

ABSTRAK

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah satu kesatuan sistematis dan terpadu dengan melakukan pelestarian, pencegahan fungsi lingkungan hidup untuk terhindar dari pencemaran atau kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian, pemeliharaan serta penegakan hukum lingkungan hidup. Dengan adanya dua isu hukum yaitu, bagaimana kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan dalam pengendalian limbah sampah pemukiman, dan serta bagaimana tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian limbah sampah pemukimann di Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang didasarkan oleh fakta, realita, data, dan permasalahan yang ada di lapangan, sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dilapangan kemudian dikaitkan dengan aturan yang ada dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup. Hasil penelitian diatas maka memperoleh kesimpulan bahwa jaminan perlindungan serta pelayanan dalam lingkungan yang sehat merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.

Kata Kunci :Pengendalian, Perlindungan, Tanggung Jawab, Masyarakat

ABSTRACT

Environmental Protection and management of the environment is a systematic and integrated unity by carrying out conservation, prevention of environmental functions to avoid pollution or damage to environmental ecosystems which include planning, utilization, supervision, control, maintenance and enforcement of environmental law. With the existence of two legal issues, namely, how is the performance of the Bangkalan Regency Environmental Agency in controlling residential waste, and also how is the responsibility of the Environmental Agency in controlling settler waste in Bangkalan Regency.

This study uses empirical legal research methods, namely research that is based on facts, reality, data, and problems that exist in the field, the source of data obtained directly from the subject of research in the field then associated with the rules contained in Law No. 32 of 2009 Regarding Environmental Control and Management, Bangkalan District Regulation Number 5 of 2012 concerning Waste Management, and Bangkalan Regent Regulation Number 46 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Tasks and Functions, and work procedures for the Environmental Service. The results of the above study then concluded that the guarantee of protection and service in a healthy environment is the responsibility of the central and regional governments.

Keywords: Control, Protection, Responsibility, Society